

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA  
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)  
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap LPP PBJ;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) Tahun 2017.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 05/BA/PA/D32/02/2017;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

KETIGA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Februari 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
 SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG  
 PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
 PROGRAM PELATIHAN DAN  
 PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI  
 KEAHLIAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI  
 LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN  
 (LPP) TAHUN 2017.

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

**DAFTAR LPP PBJ  
 TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN  
 SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>KAB/KOTA PROVINSI</b>	<b>STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI</b>	<b>MASA BERLAKU</b>
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung	Bandung Jawa Barat	Terakreditasi A	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2022
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya	Surabaya Jawa Timur	Terakreditasi A	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2022
3.	Lembaga Kajian dan Pelatihan Manajemen (LKPM) IPWI	Bogor Jawa Barat	Terakreditasi A	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2022
4.	PPM Manajemen	Jakarta DKI Jakarta	Terakreditasi A	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2022
5.	Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Diponegoro	Semarang Jawa Tengah	Terakreditasi A	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2022
6.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang	Semarang Jawa Tengah	Terakreditasi B	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2021
7.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang	Semarang Jawa Tengah	Terakreditasi B	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2021
8.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	Medan Sumatera Utara	Terakreditasi B	14 Februari 2017 s/d 14 Februari 2021

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Februari 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI